

# WACANA DALAM *TWEET* TSAMARA AMANY TERKAIT TOPIK PEMBUBARAN KPK

Grasella Sofia Mingkid, Gatut Priyowidodo, Fanny Lesmana, Prodi Ilmu  
Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya

*grasellamingkid@gmail.com*

## Abstrak

Pada 6 Juli 2017 lalu, media sosial Twitter di Indonesia sempat diramaikan dengan perang argumen atau *twitwar*, antara wakil ketua DPR Fahri Hamzah dengan politisi muda, Tsamara Amany Alatas terkait topik pembubaran KPK. Perdebatan keduanya menarik perhatian netizen dan memunculkan tagar #TanyaPakFahri yang kemudian menjadi *trending topic* Twitter. Para aktor politik kian masif menggunakan media sosial sebagai generasi ketiga dalam komunikasi politik. Media sosial digunakan untuk menyebarkan ideologi yang dapat mendominasi atau memarjinalkan orang lain atau bahkan melawan dominasi itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan wacana apa yang dibangun dalam *tweet* Tsamara Amany terkait topik pembubaran KPK. Dengan menggunakan metode analisis wacana model Theo van Leeuwen, penghilangan ataupun pemasukan aktor mendeteksi bagaimana suatu kelompok dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Temuan penelitian ini menunjukkan Tsamara menggunakan *tweet-tweetnya* terkait topik pembubaran KPK untuk membangun wacana yakni dirinya berada di pihak masyarakat yang termarjinalkan karena tidak bisa menentukan kebijakan terkait KPK. Sementara itu, DPR digambarkan sebagai pihak yang mendominasi karena DPR lah yang dapat membuat kebijakan, memiliki hak angket terhadap KPK. Selanjutnya, kemunculan dirinya sebagai kader Partasi Solidaritas Indonesia digambarkan ingin melawan dominasi yang ada. Dirinya dan PSI digambarkan sebagai figur dan partai politik baru yang membawa terobosan serta dapat mewakili aspirasi rakyat.

Kata kunci: Analisis Wacana Kritis, media sosial, *twitwar*, KPK, partai politik

## Pendahuluan

Pada 6 Juli 2017 lalu, media sosial Twitter di Indonesia sempat diramaikan dengan perang argumen antara wakil ketua DPR Fahri Hamzah dengan seorang politisi muda, Tsamara Amany Alatas. Fahri Hamzah yang sebelumnya mengeluarkan *tweet-tweet* berisi kritikan atas kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapatkan balasan *tweet* dari Tsamara yang tidak setuju dengan pernyataan dalam *tweet-tweet* Fahri tersebut. *Tweet* pertama yang diunggah Tsamara yakni :



Gambar 1. *Tweet* pertama Tsamara menanggapi Fahri Hamzah

Sumber: *screenshot* dari akun Twitter @TsamaraDKI

Tsamara kemudian melanjutkan *tweet-tweet* sambungan lainnya dan membuat yang dikenal dengan istilah *kultwit* atau kuliah Twitter. Selanjutnya, kedua politisi tersebut saling balas-membalas *tweet* hingga beradu argumen atau yang dikenal dengan istilah *twitwar* (Parikesit, 2013, para. 2). *Twitwar* antara Tsamara dengan Fahri ini menarik perhatian netizen dan memunculkan tagar #TanyaPakFahri. Tagar tersebut digunakan para netizen untuk ikut meramaikan suasana perdebatan sehingga tagar #TanyaPakFahri tersebut menjadi *trending topic* di Twitter. Menariknya, sejak *twitwar* tersebut, nama Tsamara menjadi perbincangan di Twitter dan semakin dikenal oleh publik (jawapos.com, 2017, para. 1). Beberapa media mengangkat soal *twitwarnya* dengan Fahri. Bahkan, sosok Tsamara juga tidak ketinggalan diangkat, mulai tentang usianya yang masih muda, berani, dinilai mewakili politisi *millennial*, hingga soal kehidupan pribadinya.

Fenomena penggunaan media baru yakni internet menjadi hal yang menarik dalam komunikasi politik kontemporer di dunia maupun di Indonesia. Para aktor politik, baik politisi (wakil maupun ideolog), figur politik, birokrat, aktivis kelompok kepentingan (*interest group*), kelompok penekan (*pressure group*), maupun jurnalis media massa juga menggunakan media baru secara intensif untuk membaca dan mengekspresikan opini-opini politik mereka. Media baru merupakan generasi ketiga dalam komunikasi politik yang memungkinkan siapapun menjadi produsen sekaligus sebagai konsumen informasi. (Heryanto, 2018, p. 24-33).

Tsamara Amany sendiri sebenarnya sudah aktif menggunakan media sosial, khususnya Twitter jauh sebelum *twitwarnya* dengan Fahri Hamzah. Ia menyuarakan pendapat tentang isu-isu politik di Indonesia melalui akun

Twitternya sejak tahun 2014 (tabloidbintang.com, 2017, para. 5). Beberapa isu yang sempat ia komentari diantaranya tentang kebijakan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, hingga kebijakan Presiden Joko Widodo. Dalam kaitannya dengan kontestasi politik, karakteristik media sosial yang interaktif, menurut penelitian dari *Ari-Matti Auvinen Centre for European Studies* yang berjudul *Social media - The New Power Of Political Influence* (dalam Ardha, 2014) dapat mempengaruhi keputusan voting. Tsamara Amany, seperti yang dikatakannya dalam wawancara dengan NET TV, ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta dan ingin serius terjun ke dalam dunia politik. Jika demikian, mengutip pendapat Heryanto, Tsamara membutuhkan pendekatan media baru dengan segala karakteristiknya yang memungkinkan ia dapat berinteraksi secara lebih intensif dan mempengaruhi keputusan voting para pemilih.

Pernyataan-pernyataan atau teks yang diunggah seseorang di akun media sosial dapat dipengaruhi oleh ideologi pengguna tersebut. Hal ini karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu (Eryanto, 2001, p. 13). Ideologi dapat digunakan untuk mendominasi atau memarjinalkan orang lain, juga sebagai usaha berjuang melawan dominasi itu sendiri. Peneliti tertarik untuk melihat wacana yang dibangun dalam *tweet* Tsamara Amany di akun Twitternya @TsamaraDKI terkait topik pembubaran KPK. Hal ini karena, *tweet-tweet* tersebut, termasuk *twitwarnya* dengan Fahri Hamzahlah, yang sempat menjadi viral, menjadi perbincangan di media sosial, dan membuat Tsamara semakin dikenal publik, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Wacana di sini tidak digambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan (Eriyanto, 2001, p. 7). Penelitian ini melihat konteks, seperti situasi politik, khususnya tentang keberadaan Tsamara sebagai seorang politisi muda berusia 21 tahun yang memiliki cita-cita menjadi Gubernur DKI Jakarta dan maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019 mendatang dari Partai Solidaritas Indonesia (kompas.com, 2018).

Sebelumnya, sudah ada beberapa penelitian tentang wacana yang dibangun di media sosial Twitter di antaranya, penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2014) tentang Analisis Wacana *Tweet* Farhat Abbas dalam Akun Twitter Pribadi Farhat Abbas, penelitian oleh Besman (2014) dengan judul Pencitraan *Visionary Hero* di Masa Kampanye dalam Media Sosial Twitter; Analisis Wacana Teun A. Van Dijk di Akun Twitter @ridwankamil dalam Kampanye Pilwakot Bandung 2013, serta penelitian oleh Mulyadi (2015) dengan judul Gerakan Sosial di Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Gerakan Sosial Melalui Hashtag “#ShameOnYouSBY” di Twitter). Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, penelitian ini ingin melihat bagaimana subjek Tsamara Amany membangun wacana tertentu melalui *tweet-tweet*nya terkait topik pembubaran KPK. Hal ini menjadi menarik karena Tsamara merupakan seorang politisi muda yang baru terjun ke dunia politik dan berasal dari partai baru yakni Partai Solidaritas Indonesia. Meskipun baru muncul di panggung politik Indonesia, Tsamara sudah lama menyampaikan pendapat, termasuk tentang isu-isu politik di media sosialnya. Selain itu, teks yang akan

peneliti teliti bukan hanya *tweet* biasa, namun juga *tweet* yang berupa *kultwit* dan *twitwar*.

## Tinjauan Pustaka

### Media Baru sebagai Saluran Politik

Media baru merupakan generasi ketiga dalam komunikasi politik yang memungkinkan siapapun menjadi produsen sekaligus sebagai konsumen informasi. Blumer dan Kavanagh (dalam Heryanto, 2018, p. 24) menyadari suatu kemunculan "*third age of political communication*" di mana media cetak dan penyiaran akan kehilangan tempatnya sebagai saluran utama komunikasi politik pada era baru melimpahnya informasi.

Menurut Gun Gun Heryanto (2013) ada empat argumentasi mengapa komunitas virtual dalam ruang internet menjadi kekuatan baru di dunia politik, yakni, pertama, komunitas virtual semakin menunjukkan identitasnya sebagai komunitas pengontrol sekaligus juga kelompok penekan. Kedua, komunitas virtual itu tak terbatas oleh keterpisahan tempat, waktu, ideologi, status sosial ekonomi maupun pendidikan. Ketiga, komunitas virtual memungkinkan terbentuknya kesadaran kelompok bersama. Setiap orang dapat berinteraksi. Bertukar isu, menciptakan tema-tema fantasi dan visi retorik yang dapat membentuk kesadaran kelompok.

### Cyberdemocracy

Demokrasi melalui internet atau yang disebut *cyberdemocracy* adalah sebuah konsep yang melihat internet sebagai teknologi yang memiliki pengaruh sosial transformatif dan memperluas partisipasi demokrasi (Hague dkk, dalam Juditha, 2016). Barber (dalam Juditha, 2016) mengungkapkan bahwa internet menawarkan sebuah alternatif komunikasi di mana masyarakat saling berkomunikasi dan bersuara tanpa perantara elit politik. Hal ini menimbulkan wacana yang menentang pola komunikasi hirarki dalam politik, sehingga media baru dianggap mendorong demokrasi secara langsung. Di sini dialog antar masyarakat terjalin begitu kuat sehingga institusi politik kadang terlewatkan oleh proses ini.

### Wacana dalam Paradigma Kritis

Pandangan kritis dipengaruhi oleh ide dan gagasan Marxis yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem kelas. Masyarakat dilihat sebagai suatu sistem dominasi, dan media adalah salah satu bagian dari sistem dominasi tersebut. Pandangan kritis melihat masyarakat didominasi oleh kelompok elit. Media adalah alat kelompok dominan untuk memanipulasi dan mengukuhkan kehadirannya sembari memarginalkan kelompok yang tidak dominan (Eryanto, 2001, p. 22-23).

## Metode

### Konseptualisasi Penelitian

Media baru merupakan generasi ketiga dalam komunikasi politik yang memungkinkan siapapun menjadi produsen sekaligus sebagai konsumen

informasi. Teks yang diunggah di media sosial dapat dipengaruhi oleh ideologi penggunanya. Hal ini karena teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi yang juga dapat digunakan untuk mendominasi atau memarjinalkan orang lain (Mulyadi, 2015, p. 3). Wacana dipandang melalui mana kelompok dominan mempersuasi dan mengkomunikasikan kepada khalayak produksi kekuasaan dan dominasi yang mereka miliki, sehingga tampak absah dan benar. Dalam analisis wacana kritis, wacana bukan sekadar serangkaian kata atau proposisi dalam teks melainkan juga memiliki tiga hal yang sentral yaitu teks, konteks dan wacana. Kerangka analisis wacana kritis milik Theo van Leeuwen mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana dengan dua pusat perhatian, yakni proses *exclusion* dan *inclusion*.

### *Subjek Penelitian*

Subjek penelitian ini adalah *tweet* Tsamara Amany terkait topik pembubaran KPK. Ada 51 *tweet* Tsamara Amany terkait dengan topik pembubaran KPK diperoleh dengan meng-*capture* dari timeline Tsamara Amany sejak 6 Juli 2017 hingga 31 Juli 2017.

### *Analisis Data*

Selesai melakukan pengumpulan data, peneliti mengelompokkan terlebih dahulu mana yang masuk dalam proses eksklusi maupun inklusi dengan strategi-strateginya masing-masing. Untuk mempermudah proses pengelompokkan, peneliti menyajikan data dengan cara membuat matriks. Setelahnya, peneliti melakukan reduksi data dengan cara merangkum temuan data, memilih serta memfokuskan pada hal yang penting, dan menganalisis wacana apa yang dibangun Tsamara Amany melalui *tweet-tweetnya* terkait pembubaran KPK. Setelah analisis data selesai, peneliti menuliskan interpretasi data dalam bentuk narasi dan menarik kesimpulan.

## **Temuan dan Analisis Data**

### **Proses Pengeluaran (*Exclusion*)**

Dalam proses pengeluaran (*exclusion*), Tsamara menggunakan strategi pasivasi dengan maksud-maksud tertentu. Pertama soal KPK, Tsamara berusaha untuk melindungi KPK dan menonjolkan para koruptor, seperti yang dapat dilihat dalam kalimat berikut:

- 3) 1. *Tweet* @Fahrihamzah ini lucu. Sejak KPK berdiri, 124 anggota DPR, 17 Gubernur, dan 58 walikota/bupati ditangkap.
- (5b) Di mana sukses KPK? Ya disitu, ketika banyak pejabat negara korup tertangkap, itu suksesnya.

Dalam konteks analisis wacana, Eryanto (2001, p.174) lebih menekankan bahwa strategi penghilangan aktor sosial (*exclusion*) bertujuan untuk melindungi aktor sosial atau subjek tersebut. Hal ini bisa terjadi karena saat menghilangkan aktor

sosial atau subjek, khalayak atau pembaca akan lebih memerhatikan atau tertarik pada objek.

Jika ditilik lebih jauh, sedari awal, Tsamara memang sudah tidak sependapat dengan Fahri yang cenderung ingin melemahkan KPK. Ini dilakukan Tsamara, karena menurutnya KPK adalah lembaga yang patut untuk dilindungi. Selain itu, menurutnya KPK juga telah menyelamatkan uang rakyat dan rakyat jauh lebih percaya pada KPK ketimbang DPR. Tsamara sendiri memiliki nilai-nilai yang ia anut dan perjuangkan, yakni anti korupsi dan anti intoleransi. Hal ini dikemukakannya dalam tulisannya di media daring kumparan.com pada April 2017 lalu. Nilai anti korupsi dan anti toleransi juga menjadi alasan Tsamara bergabung dengan PSI, karena PSI juga menekankan kedua nilai tersebut. Hal inilah juga yang mendorong Tsamara tetap membela KPK.

Selain strategi pasivasi, Tsamara juga menggunakan strategi nominalisasi. untuk menghilangkan aktor Fahri Hamzah, dirinya sendiri (Tsamara), DPR dan PSI. Penggunaan strategi nominalisasi pada aktor Fahri Hamzah dapat dilihat dalam kalimat-kalimat berikut:

(25b) Sbg rakyat, kita butuh penjelasan & bukti.

(34) Lho, saya sudah mengiyakan ajakan @nongandah untuk debat terbuka dg Pak @FahriHamzah agar publik menilai. Masa solusinya datang ke DPR?

Strategi nominalisasi berhubungan dengan mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina), umumnya dilakukan dengan memberi imbuhan “pe-an”. Nominalisasi dapat menghilangkan aktor dalam teks karena penggunaan kata benda (nomina) tidak membutuhkan kehadiran subjek. Kata benda bisa hadir mandiri dalam kalimat. Ini berbeda dengan kata kerja yang hadir dalam kalimat aktif, yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek (Eryanto, 2001, p. 176).

Dalam nominalisasi terhadap subjek Fahri Hamzah, Tsamara menggunakan kata benda seperti “penjelasan”, “penjelasannya” dan “solusinya.” Di sini, Tsamara cenderung tidak ingin menyebutkan subjek tetapi lebih menekankan kepada produk yang dihasilkan subjek, yakni penjelasan dan solusi. Lebih lanjut menurut Eryanto (2001, p. 176), nominalisasi tidak hanya menghilangkan posisi subjek, namun juga dapat mengubah makna kalimat dari tindakan/kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa atau fenomena yang telah menjadi gejala umum.

Sementara itu, mominalisasi terhadap Tsamara sendiri dapat dilihat dalam kalimat-kalimat berikut:

(21b) Membela pemberantasan korupsi & KPK bagi saya adalah kewajiban moral.

(30) Terima kasih mas Addie. Perang melawan korupsi gak bisa ditawar-tawar

(31a) Kalau beda dapil kenapa Pak?

(32a) Dg senang hati, mba. Bagiku perdebatan semacam ini perlu.

(39a) Diskusi tentang pansus hak angket KPK di @antikorupsi

Dalam kalimat-kalimat di atas, kata benda yang digunakan yakni, “pemberantasan”, “perang”, “dapil”, “perdebatan”, “diskusi.” Kata-kata benda tersebut menghilangkan aktor atau subjek karena sejatinya kata benda (nomina)

bisa secara mandiri tanpa subjek. Dengan demikian, subjek Tsamara menjadi hilang.

Menarik untuk dilihat bahwa semua kata kerja di atas mewakili produk yang dihasilkan oleh subjek dan sebagian besar kata tersebut menunjukkan aktivitas yang berani dan terbuka (pemberantasan, perang, perdebatan, diskusi).

Demikian juga dengan aktor PSI, tempat Tsamara bernaung. Nominalisasi yang dilakukan pada PSI dapat dilihat dalam kalimat-kalimat berikut:

(24b) Gpp. Yg penting perjuangan kami untuk berantas korupsi gak setengah2.

(47) Bersatu dalam semangat memberantas korupsi.  
#iTrustKPK

Penggunaan kata benda “perjuangan” dalam kalimat (24b) dan “semangat” dalam kalimat (47) menghilangkan subjek PSI sebagai aktor yang sedang “berjuang” dan juga “bersemangat” dalam memberantas korupsi. Seperti pada nominalisasi pada Tsamara. Ketika telah diubah dalam bentuk gejala, tentu saja kalimat-kalimat di atas telah terlepas dari konteks pelaku, waktu, dan tempat.

Menurut Eryanto (2001, p.177) konteks semacam ini bisa dihilangkan karena yang ingin ditekankan adalah pemberantasan korupsi, perang melawan korupsi, perdebatan, diskusi menjadi gejala umum bagi aktor yakni Tsamara maupun PSI. Jika ditinjau lebih lanjut lagi, dengan menjadikan produk-produk subjek di atas sebagai sebuah gejala umum, Tsamara sedang merepresentasikan dirinya sebagai anggota PSI yang memang memiliki nilai-nilai anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Kalimat-kalimat di atas ingin menekankan bahwa perjuangan dan semangat memberantas korupsi sudah menjadi gejala umum bagi Tsamara maupun PSI.

Hal ini bisa dikaitkan dengan empat nilai dasar yang dibawa PSI sebagai partai baru. Salah satu nilai yaitu meritokrasi seperti yang dikutip dari website resmi psi.id menyatakan, “Perjuangan PSI juga didasari oleh nilai-nilai meritokrasi. PSI akan berupaya mewujudkan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mencapai dan memperoleh sesuatu sesuai dengan kemampuan dan usahanya. Nilai meritokrasi menghargai kinerja dan memberi kesempatan yang adil bagi setiap orang untuk bekerja keras mencapai kemungkinan yang tak terhingga. Penerapan nilai-nilai meritokrasi di dalam urusan publik akan membebaskan kita dari jerat korupsi, kolusi dan nepotisme” (psi.id, 2015).

### **Proses Pemasukan (*Inclusion*)**

Selain menggunakan *exclusion*, Tsamara juga menggunakan *inclusion*. Tsamara paling banyak menggunakan strategi wacana diferensiasi saat memasukkan aktor DPR. Hal tersebut dapat dilihat dari bagan dan kalimat-kalimat berikut:

(8a) Dari sekian banyak UU yg jd prioritas, hanya sedikit yg terselesaikan.

(9a) 4.Tahun 2015, ada 39 RUU prioritas, hanya 3 yg selesai.

(9b) Tahun 2016, ada 50 RUU Prolegnas yg jd prioritas DPR, hanya selesai 9. @FahriHamzah

(10a) 5. Jadi jangan heran, Pak @FahriHamzah kalau survei SMRC menunjukkan hanya 6,1% rakyat yg percaya DPR. Beda dg KPK yg dipercaya 64,4% rakyat.

Menurut Eryanto, suatu peristiwa atau aktor sosial bisa ditampilkan di dalam teks secara mandiri sebagai suatu peristiwa yang unik, tetapi bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam teks. Penghadiran kelompok atau peristiwa lain dalam teks secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa kelompok itu tidak bagus dibandingkan dengan kelompok lain.

Dalam kalimat-kalimat di atas, nampak bahwa Tsamara membandingkan kinerja DPR selama masa jabatan hingga tahun 2016. Tsamara membandingkan target dan realisasi RUU. Selain itu juga, Tsamara menggunakan hasil survei *Saiful Mujani Research Center* (SMRC) untuk membandingkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR dan KPK. Hasil survei, menurut Eryanto (dalam Cangara, p. 178) sangat berperan penting dalam menentukan pilihan politik seseorang. Selain itu, hasil survei dari lembaga survei juga dapat mempengaruhi pendapat umum. Dalam hal ini, penggunaan data dari SMRC yang dilakukan Tsamara juga dapat mempengaruhi pendapat umum dari pengguna Twitter yang membaca *tweetnya* tersebut. Ini merupakan strategi wacana bagaimana suatu kelompok, dalam hal ini DPR, disudutkan dengan menghadirkan kelompok atau wacana lain yang dipandang lebih dominan atau lebih bagus. Fakta-fakta mengapa DPR tidak berhasil merampungkan target RUU serta mengapa hasil survei SMRC menunjukkan kepercayaan rakyat kepada KPK lebih tinggi dibanding DPR, tidak disebutkan dalam teks. Akibatnya, yang tergambar dalam teks melulu tentang perbedaan cara pandang antara cara yang dianggap bagus dengan cara yang dianggap tidak bagus.

Dari kondisi ini, dapat dilihat bahwa Tsamara ingin para khalayak mempertimbangkan kembali kondisi DPR, yang dalam wacananya, tidak mampu merampungkan apa yang menjadi tanggung jawab wakil rakyat. Tsamara juga ingin menunjukkan bahwa DPR tidak mendukung pemberantasan korupsi karena ingin melemahkan KPK. Padahal, DPR jelas-jelas mendapatkan kepercayaan rakyat jauh lebih kecil dibanding KPK menurut survei SMRC. Dengan mempertimbangkan kembali DPR yang diisi oleh partai-partai dan oknum-oknum lama, Tsamara secara tidak langsung ingin mengarahkan pikiran pembaca *tweetnya* untuk melihat alternatif lain, yakni PSI sebagai partai politik baru yang berbeda karena PSI menawarkan nilai-nilai diantaranya anti korupsi dan bekerja untuk rakyat.

Pola selanjutnya yang muncul adalah Tsamara hampir selalu mengaitkan KPK dengan peristiwa reformasi, bahwa KPK adalah anak kandung reformasi dan pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi.

(16a)10. Saya khawatir Pak @FahriHamzah ini lupa bahwa pemberantasan korupsi adalah amanat reformasi.

(16b) KPK adalah anak kandung reformasi!

Strategi ini disebut asosiasi, di mana aktor atau suatu peristiwa dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Asosiasi membuat makna menjadi lebih besar (glorifikasi), karena asosiasi membuat khalayak membayangkan dan menghubungkan secara imajiner dengan komunitas atau peristiwa yang lebih luas. Reformasi merupakan suatu peristiwa besar dalam sejarah bangsa Indonesia yang menyalahkan amanat salah satunya tentang pemberantasan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (tirto.id, May 2017).

Pemberantasan korupsi sebagai amanat reformasi juga tertuang di dalam Tap MPR XI/98 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Hal ini kemudian diturunkan menjadi UU No 20/2001 yang menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Ini karena korupsi telah terjadi secara sistematis dan merasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa. Itulah mengapa KPK dibentuk karena dirasa perlu ada lembaga khusus yang menangani kejahatan luar biasa (detik.com, 2017, para. 3).

Hal ini semakin mempertegas strategi sebelumnya, yakni strategi diferensiasi, di mana KPK dibuktikan sebagai lembaga yang patut dibela karena sudah berkaitan dengan peristiwa yang lebih besar dan merupakan sejarah bangsa yakni reformasi. Hal ini juga mempertegas bahwa KPK tidak seharusnya dilemahkan. Pihak yang berusaha untuk melemahkan KPK berarti juga menentang sejarah reformasi yang telah memberi amanah untuk dijalankan.

Selanjutnya, pola yang peneliti temukan adalah penggunaan efek generalisasi oleh Tsamara setiap kali ia menyebutkan kesalahan dari argumen Fahri Hamzah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kalimat berikut :

- (2b) Apa yang dilakukan KPK itu menyelamatkan uang pajak saya dan jutaan rakyat Indonesia lainnya. #SaveKPK
- (25c) Sbg rakyat, kita butuh penjelasan & bukti.
- (27c) Jd menurut Bapak kami yg dukung KPK kurang cerdas?

Tsamara banyak menyebutkan kata-kata ‘rakyat Indonesia’, ‘kami’, dan ‘wakil rakyat’. Pada kalimat (2b) Tsamara menggunakan efek generalisasi dengan menyebutkan jutaan rakyat Indonesia yang terkena efek dari kerja keras KPK menyelamatkan uang rakyat dari korupsi. Selain itu, Tsamara juga menggunakan kata kami, seperti pada kalimat (26a) dan (27c). Kata kami menimbulkan efek jamak yang berarti seluruh rakyat Indonesia. Strategi ini merupakan salah satu strategi *inclusion* yakni asimilasi. Eryanto (2001, p.187) menyebutkan, asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor secara spesifik yang disebut, melainkan komunitas atau kelompok sosial di mana aktor tersebut berada. Pada kalimat-kalimat di atas, komunitas dan kelompok sosial yang dituju yakni rakyat Indonesia. Dalam strategi wacana ini, Tsamara mengesankan ada begitu banyak orang (rakyat) yang merasa kecewa dengan Fahri Hamzah sebagai wakil rakyat. Tsamara juga menggiring pemikiran bahwa masalah KPK ini merupakan masalah yang lebih besar atau masalah masyarakat Indonesia bersama.

Penggunaan strategi asimilasi, diferensiasi dan asosiasi yang mengesankan bahwa DPR belum bekerja dengan maksimal sebagai wakil rakyat dan bahwa komunitas yang dipengaruhi keadaan tersebut sangat besar (rakyat), digunakan Tsamara untuk memasukkan ideologi partainya. PSI dikenal sebagai partai baru yang para pengurusnya belum pernah terlibat di dalam partai politik. Grace Natali, Ketua PSI menyatakan alasan didirikannya partai ini salah satunya karena keresahan terhadap wajah lama di panggung politik Indonesia yang mengaku sebagai wakil rakyat, tetapi tidak mendengarkan aspirasi rakyat, apalagi aspirasi anak muda dan perempuan (psi.id, Desember 2015).

Temuan data juga menunjukkan bahwa Tsamara berusaha menempatkan dirinya sama dengan masyarakat dengan penggunaan kata kita atau kami, seperti dalam *tweet* ketika Tsamara menyamakan dirinya sebagai kelompok masyarakat yang membela KPK.

(27c) Jd menurut Bapak kami yg dukung KPK kurang cerdas?

Kalimat di atas adalah salah satu yang menunjukkan Tsamara menempatkan dirinya setara atau sama atau merupakan bagian dari masyarakat yang mendukung KPK. Hal ini menjadi mungkin, karena seperti kata Heryanto (2018, p.23) dalam *cyberdemocracy*, aku diri dan aku publik kerap berganti peran. Menurut Heryanto (2018) objek formal komunikasi politik juga adalah proses penciptaan kebersamaan dalam makna (*the commonness in meaning*) tentang fakta dan peristiwa politik. Dengan menyamakan diri dan posisinya, Tsamara sedang ingin menciptakan kebersamaan dalam makna tentang peristiwa terkait KPK ini.

Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari studi tentang psikologi komunikator, di mana Tsamara sebagai seorang komunikator, sedang berusaha untuk menginternalisasi nilai-nilai pada komunikannya di Twitter. Rogers (dalam Rakhmat, 2015, p. 259) menyatakan, orang mudah berempati dan merasakan perasaan orang lain yang dipandanginya sama dengan dirinya. Kesamaan tersebut memudahkan terjadinya perubahan pendapat. Nilai-nilai yang sedang diinternalisasikan Tsamara adalah nilai-nilai dirinya sendiri yang juga adalah nilai-nilai PSI.

Hal ini mungkin dilakukan di media sosial karena menurut Heryanto (2018, p. 189) komunitas virtual di media sosial memungkinkan terbentuknya kesadaran kelompok bersama. Setiap orang dapat berinteraksi. Bertukar isu, menciptakan tema-tema fantasi dan visi retorik yang dapat membentuk kesadaran kelompok. Pada saat media massa mempublikasikan tema kesadaran, biasanya keterhubungan individu masih bersifat artifisial. Hal itu akan diperteguh dan lebih personal pada saat dia terhubung dengan komunitas virtualnya. Dinamika komunitas jejaring sosial itu unik karena memiliki karakteristik yang cair, kebebasan individu yang sangat besar dan sangat mungkin digunakan oleh siapa saja untuk kepentingan apa saja, termasuk Tsamara yang adalah kader partai politik dan ingin menjadi pejabat publik.

## Interpretasi Data

Internet merupakan generasi ketiga dalam komunikasi politik di masa *cyberdemocracy* ini. Siapapun dapat menyampaikan pendapatnya, dan bebas untuk menyebarkan ideologi melalui media teks tanpa mempedulikan hirarki politik. Tsamara Amany muncul dalam percakapan media sosial yang bebas itu dan berusaha untuk membela lembaga KPK sebagai lembaga yang dilemahkan oleh DPR. Saat membela KPK, Tsamara menempatkan dirinya pada posisi yang sama dengan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui bahasa yang digunakan oleh Tsamara dalam *tweet-tweetnya*. Dengan mengeluarkan (*exclusion*) dan memasukkan (*inclusion*) aktor, Tsamara membangun sebuah wacana di mana ia berada di pihak masyarakat yang dimarjinalkan akibat tidak bisa menentukan

kebijakan terkait KPK. Sementara itu, DPR digambarkan sebagai pihak yang mendominasi karena DPR lah yang dapat membuat kebijakan.

Usaha Tsamara untuk menempatkan diri di pihak masyarakat ini menjadi mungkin, karena dalam *cyberdemocracy*, aku diri dan aku publik kerap berganti peran. Sehingga, Tsamara dapat menempatkan dirinya juga sebagai rakyat atau publik. Dengan kata lain, Tsamara ingin menunjukkan bahwa dirinya secara pribadi maupun sebagai kader partai politik PSI, berada di pihak masyarakat dan ingin membela KPK, lembaga yang paling berjasa untuk menuntaskan kasus korupsi dan digambarkan sebagai pahlawan masyarakat.

Tidak sampai di situ saja, Tsamara juga menggiring para netizen untuk melihat bagaimana keadaan wakil rakyat di DPR saat ini. Karenanya, tidak hanya soal membela KPK, tetapi wacana yang ingin dibangun adalah bagaimana dirinya melalui PSI dapat meraih kekuasaan dari pihak dominan. Dengan penggunaan strategi pasivasi, nominalisasi, asimilasi, asosiasi, dan kategorisasi, Tsamara ingin masyarakat dalam hal ini netizen mempertimbangkan para wakil rakyat yang duduk di DPR saat ini. Tsamara menempatkan dirinya dan PSI sebagai pihak yang marjinal karena merupakan partai baru, namun hendak menerobos ketidakefektifan partai-partai yang memiliki perwakilan di DPR. Oleh karenanya, rakyat membutuhkan figur dan partai yang dapat mengakomodir aspirasinya, khususnya dalam memberantas korupsi.

Hal ini juga berkaitan dengan pemilihan legislatif yang akan dilangsungkan pada 2019 mendatang. Tsamara melalui *tweet-tweetnya* secara tidak langsung ingin agar para pemilih menjatuhkan pilihan kepada dirinya dan Partai Solidaritas Indonesia. Dalam hal ini, jika dirinya maupun PSI menang dan telah memiliki kekuasaan, maka kekuasaan tersebut dapat digunakan untuk melawan bentuk-bentuk dominasi yang telah ada saat ini, yang tidak sesuai dengan suara masyarakat pada umumnya, khususnya terkait KPK.

## Simpulan

Dengan menggunakan strategi pasivasi, nominalisasi, asosiasi, kategorisasi, dan asimilasi, Tsamara menyamakan diri sebagai pihak yang dimarjinalkan akibat tidak punya hak untuk menentukan kebijakan. Dalam hal ini, pihak yang dimarjinalkan adalah rakyat, karena rakyat tidak memiliki kuasa untuk menentukan kebijakan. Sementara itu, DPR digambarkan sebagai pihak yang mendominasi karena dapat menentukan kebijakan terkait KPK. Dengan berada di pihak masyarakat, dan menggunakan media Twitter untuk menyampaikan pendapatnya, Tsamara berusaha untuk menunjukkan ketidakefektifan kinerja DPR saat ini. Karena itu, masyarakat perlu memikirkan kembali perwakilan yang akan duduk di DPR nantinya. Sementara itu, ia mulai menawarkan dirinya dan PSI sebagai partai yang baru, bersih dan berjuang untuk kaum marjinal yang tidak bisa mengambil kebijakan. Dengan masuknya dirinya dan PSI di DPR, mereka mungkin bisa mengubah kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat.

## Daftar Referensi

- Ardha, B. (2014). *Media Sosial sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 di Indonesia*. Retrieved April 9, 2018 from <https://www.neliti.com/publications/142298/social-media-sebagai-media-kampanye-partai-politik-2014-di-indonesia>
- Besman, A. (2014). *Pencitraan Visionary Hero di Masa Kampanye dalam Media Sosial Twitter*. Retrieved Februari 27, 2018 from [https://www.researchgate.net/publication/319186567\\_Pencitraan\\_Visionary\\_Hero\\_Di\\_Masa\\_Kampanye\\_Dalam\\_Media\\_Sosial\\_Twitter\\_Analisis\\_Wacana\\_Teun\\_Adrianus\\_Van\\_Dijk\\_Di\\_Akun\\_Twitter\\_Ridwankamil\\_Dalam\\_Kampanye\\_Pilwakot\\_Bandung\\_2013](https://www.researchgate.net/publication/319186567_Pencitraan_Visionary_Hero_Di_Masa_Kampanye_Dalam_Media_Sosial_Twitter_Analisis_Wacana_Teun_Adrianus_Van_Dijk_Di_Akun_Twitter_Ridwankamil_Dalam_Kampanye_Pilwakot_Bandung_2013).
- Carina, J. (2017). Tsamara Ungkap Alasan Berani “Speak Up” Hamzah. Retrieved June 4, 2018 from <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/24/13012581/tsamara-amany-ungkap-alasan-berani-speak-up-lawan-fahri-hamzah>.
- Darma, Y. (2014). *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.
- Ginjar, D. (2017). *Mengulik Cerita Tsamara Amany Saat Berani “Ceramahi” Fahri Hamzah*. Retrieved May 28, 2018 from <https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/07/2017/mengulik-cerita-tsamara-amany-saat-berani-ceramahi-fahri-hamzah>
- Hafied, C. (2011). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Heryanto, G. (2018). *Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Juditha, C. (2016). *Demokrasi Media Sosial: Kasus Polemik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah*. Retrieved Mei 19, 2018 from <https://231005-demokrasi-di-media-sosial-kasus-polemik-94e515fe.pdf>.
- Mayasari. (2014). *Tweet Farhat Abbas Dalam Akun Twitter Pribadi Farhat Abbas; Analisis Wacana*. Retrieved February 27, 2018 from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/solusi/article/view/53>.
- Mulyadi, U. (2015). *Gerakan Sosial di Media Sosial (Analisis Wacana Kritis Gerakan Sosial Melalui Hashtag “#ShameOnYouSBY” di Twitter)*. Retrieved Mei 19, 2018 from <http://eprints.undip.ac.id/46925/>.
- Parikesit, A. (2013, Agustus). *Bersitegang dengan Twitwar*, Retrieved April 8, 2018 from <https://inet.detik.com/cyberlife/d-2333650/bersitegang-dengan-twitwar>.
- Putri, A. (2017). *Tsamara Amany, Politikus Cantik yang Melawan Fahri Hamzah di Media Sosial*. Retrieved April 8, 2018 from <https://www.tabloidbintang.com/berita/sosok/read/77681/tsamara-amany-politikus-cantik-yang-melawan-fahri-hamzah-di-media-sosial>.
- Rakhmat, J. (2015). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.